

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM E – FILING DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA DAN
TAHUNAN (DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
SIDOARJO UTARA)**

SKRIPSI

Oleh :

DEWI RETNOSARI

NIM : G92214030



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Dewi Retnosari

NIM : G92214030

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi

Judul Skripsi Analisis Penerapan Sistem E – Filing Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Dan Tahunan (Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Dewi Retnosari

NIM. G92214030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Retnosari NIM. G92214030 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Juli 2018
Pembimbing,



Imam Buchori, SE, M.Si
NIP.196809262000031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Retnosari NIM. G92214030 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 24 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu bidang Akuntansi.

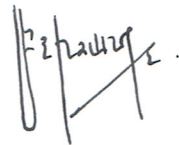
Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



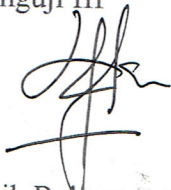
Imam Buchori, SE., M.Si
NIP. 196809262000031001

Penguji II



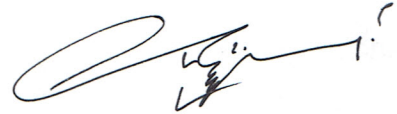
Dr. Fatmah, ST, MM
NIP. 197507032007012020

Penguji III



Lilik Rahmawati, MEI
NIP. 198106062009012008

Penguji IV



Andhy Permadi, M. Kom
NIP. 198110142014031002

Surabaya, Juli 2018
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DEWI RETNOSARI
NIM : G92214030
Fakultas/Jurusan : FEBI/ AKUNTANSI
E-mail address : dretnosari370@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS PENERAPAN SISTEM E – FILING DALAM UPAYA MENINGKATKAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN (SPT) MASA DAN TAHUNAN (DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA SIDOARJO UTARA)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Agustus 2018

Penulis

(DEWI RETNOSARI)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Analisis Penerapan Sistem E – Filing Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Masa Dan Tahunan (Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara)”** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana analisis Implementasi Sistem *E-filing* yang di lakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara dan Bagaimana analisis Implikasi penerapan Sistem *E-filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara.

Metodelogi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis pendekatan penelitian fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, sehingga memperoleh gambaran mengenai objek secara faktual, akurat, dan sistematis.

Hasil penelitian ini adalah implementasi Sistem *E-filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara sudah diterapkan dengan sangat baik dan tidak ada kendala dalam penerapannya, akan tetapi peningkatan kepatuhan yang dibuktikan dengan bertambahnya Wajib Pajak Badan yang menyampaikan Surat Pemberitahuannya dari tahun ke tahun, peningkatan ini tidak dibarengi dengan penyampaian Surat Pemberitahuan melalui *online* dengan menggunakan sistem *E-filing*. Penggunaan sistem ini pernah meningkat pada tahun 2015 ke 2016 dan kemudian pada tahun 2017 menurun. Penerapan sistem ini tentunya akan memunculkan implikasi yang sangat menguntungkan bagi Wajib Pajak Badan dan Kantor Pelayanan Pajak, dimana Wajib Pajak Badan dapat menyampaikan Surat Pemberitahuannya secara mudah, cepat, aman, kapan saja dan dimana saja dengan menggunakan laptop, komputer dan jaringan internet. Selain itu penumpukan Wajib Pajak yang pada tanggal-tanggal tertentu untuk menyampaikan Surat Pemberitahuannya baik Masa maupun Tahunan akan sangat berkurang sekali, penerapan sistem *e-filing* ini juga berakibat pada pengarsipan dokumen oleh Wajib Pajak, penggunaan pelaporan secara *online* mengurangi penggunaan kertas dalam pengarsipan dokumen oleh Wajib Pajak Badan, dimana jika tiap bulannya Wajib Pajak Badan menyampaikan laporan secara manual akan mencetak Surat Pemberitahuannya, akan tetapi jika Wajib Pajak melakukan pelaporan secara *online* maka otomatis data akan tersimpan di database Kantor Pelayanan Pajak. Wajib Pajak Badan juga dapat melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan pembetulan melalui sistem *e-filing* bila dirasa pengisian Surat Pemberitahuan terjadi kesalahan dalam pengisiannya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengimplementasian sistem E-filing di KPP Sidoarjo Utara sudah sangat baik dan tanpa kendala, akan tetapi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Badan tidak dibarengi dengan peningkatan penyampaian penggunaan sisten *e-filing*. Implikasi dari penerapan ini adalah kemudahan Wajib Pajak Badan yang melaporkan Surat Pemberitahuannya, penurunan antrean di KPP Sidoarjo Utara, dan penghematan dalam penggunaan kertas, dan kemudahan dalam pengarsipan dokumen.

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
	C. Rumusan Masalah	5
	D. Kajian Pustaka	6
	E. Tujuan Penelitian	10
	F. Kegunaan Hasil Penelitian	10
	G. Definisi Operasional	11
	H. Metode Penelitian	13
	I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II	SISTEM E-FILING UNTUK KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA DAN TAHUNAN	18
	A. Sistem Informasi Perpajakan	18
	1. Sistem E-Billing	18
	2. Sistem E-Form	19
	3. Sistem E-CbC Reporting	20

4. Sistem E-filing	23
B. Kepatuhan	27
1. Pengertian	27
2. Kepatuhan dalam Perpajakan	27
C. Wajib Pajak	30
1. Orang Pribadi	30
2. Badan	32
D. Surat pemberitahuan (SPT)	32
1. Pengertian	32
2. Fungsi SPT	33
3. Jenis SPT	33
4. Batas Waktu Penyampaian SPT	35
5. Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT	38
6. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT	39

**BAB III IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI SISTEM E-FILING DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO
UTARA40**

A. Profil kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sidoarjo Utara	40
1. Sejarah	40
2. Struktur Organisasi	42
3. Pelayanan	43
4. Visi dan Misi	43
B. Penerapan E-Filing di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara	44
C. Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan	48
D. Implikasi Penerapan Sistem E-Filing	51

**BAB IV ANALISIS PENERAPAN SISTEM E-FILING DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SIDOARJO
UTARA54**

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama pemasukan pada suatu negara, khususnya di Indonesia ini. Pajak menjadi sumber untuk Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN), pada tahun 2017 pendapatan negara dari pajak sebesar 1.498,9 Triliun.¹ Maka dari itu dunia perpajakan akan ikut terus berkembang seiring dengan berkembangnya modernisasi yang mengusung nilai cepat, mudah dan praktis. S.I. Djajadiningrat:

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.²

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1: “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.³ Perpajakan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, salah satunya adalah kemajuan komputerisasi system atau pun online system. Sudah sejak tahun 2014 Direktorat Jendral pajak telah mencanangkan pelaporan berbasis online atau

¹ <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017/>, diakses pada Kamis, 18 Januari 2018 – 10.57 wib.

² Siti resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, (Yogyakarta : Salemba Empat, 2014), 1.

³ Ibid., 18.

E-filing adalah salah satu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dapat dilakukan melalui *website* Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id) atau *website* Penyalur SPT Elektronik.⁴ Sudah 4 tahun berjalan peraturan tentang pelaporan elektronik ini dikeluarkan, akan tetapi masih banyak masyarakat yang tetap menyampaikan pelaporan di Kantor Pelayanan Pajak. Untuk mencanangkan program tersebut Direktorat Jendral Pajak sudah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, salah satunya dengan memberikan peraturan kepada wajib pajak yang telah menggunakan efilng, dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan dengan cara system online. Dikarenakan pentingnya penyampaian SPT masa maupun tahunan oleh wajib pajak, khususnya yang memiliki usaha harus melaporak SPT masa tiap bulannya. Undang-undang No. 28 Tahun 2007 dalam pasal (3) menyebutkan :

⁴ www.pajak.go.id/content/penyampaina-surat-pemberitahuan-online-efiing/, diakses pada Kamis, 18 Januari 2018 – 10.57 wib.

Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.⁵

Cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik dapat dilakukan oleh semua wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk elektronik melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Dirjen Pajak. Wajib pajak yang telah mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan aplikasi bisa melaporkan Surat Pemberituannya di aplikasi efilang yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak sehingga wajib pajak tidak perlu lagi menyampaikan Surat Pemberituannya (SPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Oleh karena itu wajib pajak yang ingin menggunakan pelayanan pajak secara elektronik dikarenakan mudah dan *real time* harus mengetahui bagaimana tata cara menggunakan aplikasi efiing dengan baik dan benar.

Penerapan *e-filing* yang sudah 4 tahun ini masih belum maksimal, terlihat masih banyak Wajib Pajak Badan yang sudah memiliki akun *e-filing* akan tetapi masih menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa maupun Tahunan secara manual. Akan tetapi ada beberapa KPP yang sangat ketat untuk memperlakukan penerapan *e-filing* ini, seperti contoh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng yang mewajibkan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT secara *online*. KPP akan tegas menolak Wajib Pajak yang ingin melaporkan SPT nya secara manual, kemudian KPP akan memberikan pengarahannya terhadap Wajib Pajak untuk menyampaikan secara *online*. Akan tetapi pada tahun 2017 KPP Pratama Sidoarjo Utara masih bisa

⁵ Undang-undang No 28 Tahun 2007 , http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_28, diakses pada 15 Februari 2018.

Modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal perpajakan ini akan mengikuti terus perkembangan zaman, dan sesuai dengan zaman saat ini. Segala sesuatu akan mempunyai dampak yang akan mengikutinya, baik itu dampak yang buruk maupun dampak yang baik. Begitu juga penerapan pelaporan secara elektronik ini. Wajib pajak yang mempunyai *efin* dan sudah pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik dapat menyampaikan SPT tahunannya secara elektronik. Wajib Pajak yang pernah melaporkan SPT Masa Elektronik (*e-SPT/e-Faktur/e-filing*) selanjutnya wajib melaporkan seluruh SPT Masa dalam bentuk elektronik.⁶ Adanya peraturan tersebut masih ada wajib pajak yang sudah memiliki kriteria untuk menyampaikan laporan masa secara elektronik akan tetapi tetap melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik dapat berdampak baik maupun buruk. Salah satunya adalah tentang keamanan data wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) teringat dengan banyaknya tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi tentang Analisis Penerapan *E-filing* dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Penyampaian Surat

[illegible]

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, didapatkan beberapa masalah tentang penggunaan dan penerapan sistem *e-filing* untuk pelaporan atau penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) masa ataupun tahunan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Masalah-masalah yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Implementasi sistem *e-filing* untuk pelaporan masa maupun tahunan.
2. Implikasi sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan (SPT)
3. Perlakuan wajib pajak yang tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuannya dalam bentuk elektronik.
4. Keamanan data wajib pajak yang melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan secara elektronik

- a. Implementasi sistem *e-filing* yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara
- b. Implikasi sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa maupun bulanan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara

Dari Identifikasi dan Batasan masalah di atas, didapat rumusan masalah sebagai berikut :

- #### D. Kajian Pustaka

⁷ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*: Edisi Revisi (Surabaya, Cet XII, 2017), 10

Pertama, penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan *E-filing* Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara” oleh Inne Nidya Astuti⁸. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik atau *e-filing*. Dan penelitian ini menghasilkan bahwa penerapan *e-filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara telah sesuai prosedur. Dan didapat bahwa kelebihan penerapan *e-filing* dapat menjadikan efisiensi untuk pelaporan, dan Wajib Pajak juga tidak perlu mengantri untuk melaporkan Surat Pemberitahuannya (SPT), selain itu juga kita tidak perlu memakai kertas yang banyak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

⁸ Inne Nidya Astuti, *Analisis Penerapan Efiling Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara*, (Skripsi—Universitas Negeri Surabaya, 2015)

⁹ Gusma Dwi Avianto, et al, “Analisis Peran Efiling Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)”, (2016), 1

Ketiga, penelitian dengan judul “Analisis Penerapan *E-filing* Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Timur” oleh Amrul dan Rusli.¹⁰ Penelitian ini membahas tentang bagaimana peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Timur dengan diterapkannya sistem *e-filing*. Dan hasil penelitian penerapan *e-filing* sebagai sarana pelaporan SPT tahunan yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Mataram Timur memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak.

¹⁰ Amrul dan Rusli, “Analisis Penerapan Efiling Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Timur”, (2016), 1

¹¹ Sisilia Abdurrohman, et al, “Implementasi Program *E-filing* Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro)”, (2015), 1

Kelima, yang ke lima adalah jurnal dari Kartika Ratna Handayani dan Sihar Tambun yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating (Survei Pada Perkantoran Sunrise Garden Di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat)”.¹² Penelitian ini membahas tentang apakah penerapan sistem *e-filing* dan pengetahuan perpajakan dengan menggunakan variabel sosialisasi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kawasan Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat. Hasil dari penelitian ini adalah tidak adanya pengaruh signifikan antara sistem *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak. Dan akan berpengaruh signifikan jika *e-filing* dengan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk interaksi moderasi sosialisasi perpajakan menyimpulkan bahwa hasilnya pure moderating dan memperlemah penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak serta untuk interaksi moderasi sosialisasi

[illegible]

perpajakan menyimpulkan bahwa bukan variabel moderating dan memperlemah pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

E. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Implementasi sistem *e-filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara
2. Implikasi sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara

F. KEGUNAAN HASIL PENELITIAN

Kegunaan hasil penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Berikut adalah uraiannya :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran di bidang keilmuan khususnya Akuntansi Perpajakan yang berkaitan dengan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan dengan menggunakan aplikasi.
 - b. Menambah wawasan seputar bidang yang diteliti baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain.
 - c. Sebagai sumbangan pemikiran untuk bidang akuntansi perpajakan mengenai dampak penerapan sistem penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online*.
2. Kegunaan Praktis

E-filing adalah salah satu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dapat dilakukan melalui *website* Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id) atau *website* Penyalur SPT Elektronik.¹³

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹⁴

¹³ www.pajak.go.id/content/penyampaina-surat-pemberitahuan-online-efiling

[illegible]

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹⁶

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Masa pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Penraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender.¹⁷

Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk Satu Masa Pajak¹⁸

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak¹⁹

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Creswell menyatakan bahwa:

¹⁹ Ibid.

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

- ## 2. Sumber Data

a. Data Primer

[illegible]

b. Data Sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara adalah “menurut Moleong (2005), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan atas jawaban tersebut.”²¹ Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan staff Pelayanan dan Informasi Data di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo utara. Peneliti akan menggunakan tehnik snowball pada penentuan sampling jumlah narasumber yang akan diwawancara. Menurut Prof. Dr. Sugiyono menyatakan: “Snowball

[illegible]

b. Dokumentasi menurut Haris Heridansyah adalah : “cara yang dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis atau dokumen lainnya yang dibuat oleh subjek yang bersangkutan.”²³ Jadi peneliti akan melakukan dokumentasi data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan wawancara, kemudian mengolah data, dan menganalisis data kemudian menarik kesimpulan dan interpretasi. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, menurut Hegel: “Fenomenologi berarti ‘pengetahuan sebagaimana nampak dalam kesadaran’. Pengetahuan disini maksudnya adalah apa yang dipersiapkan oleh seseorang, apa yang dirasa dan diketahui melalui kesadaran atau pengalamannya”²⁴

Penulis akan membagi beberap BAB dalam penelitian ini agar dapat sistematis. Sistematika dalam penulisan ini untuk memudahkan pembahasan

²⁴ Jonathan Parapak, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Grasindo, 2010), 81.

masalah-masalah agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis.

Adapun sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :

BAB I Membahas tentang gambaran umum tentang penelitian ini, bagaimana penelitian ini akan dilakukan dan untuk apa penelitian ini dilakukan. Maka dari itu BAB I ini mempunyai beberapa sub bab yaitu : Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Membahas tentang teori-teori yang menjadi landasan penelitian ini, yaitu teori tentang perpajakan dan pelaporan perpajakan.

BAB III Membahas tentang deskripsi penelitian, memaparkan data-data yang telah didapatkan dari hasil wawancara dengan staff maupun wajib pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara. Meliputi informasi tentang implementasi *e-filing* dan implikasi *e-filing* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara.

BAB IV Membahas tentang analisis dari hasil wawancara untuk menjawab bagaimana implikasi dan implementasi *e-filing* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apa saja implikasi yang diketahui dari penelitian ini dalam penyampaian Surat

A. Sistem Informasi Perpajakan

E-Biling pajak adalah suatu sistem informasi perpajakan yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran secara *online*. Sebelum melakukan pembayaran elektronik Wajib Pajak harus membuat kode *biling* terlebih dahulu, kode *biling* ini bisa di dapat dari sistem *biling* Direktorat Jendral Pajak secara *online* atau lewat aplikasi-aplikasi resmi lainnya yang bermitra dengan DJP, seperti :

- [illegible]

Pajak. Setelah SPT dibuat secara *offline*, wajib pajak bisa langsung mengupload SPT nya secara *online* via DJP Online.²⁷

Untuk saat ini *e-form* hanya dapat digunakan oleh Wajib Pajak yang menggunakan Formulir berikut :

1. SPT Tahunan Orang pribadi 1770S
 2. SPT Tahunan Orang Pribadi 1770
 3. SPT Tahunan Badan 1771.²⁸
3. Sistem *E – CbC Reporting*

Country by Country Report (CbC Report) atau laporan Per Negara adalah salah satu dokumen *transfer pricing* yang berisi mengenai alokasi penghasilan, pajak yang dibayar dan aktivitas usaha dari seluruh anggota grup usaha yang disajikan dalam tabulasi khusus sesuai dengan standar internasional dan akan dipertukarkan dengan otoritas pajak negara lain sesuai perjanjian internasional. Indonesia telah menandatangani *Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) on the Exchange of Country-by-Country Reports* yang berisi mengenai perjanjian untuk mempertukarkan *CbC Report* dengan negara lain. Dalam pelaksanaannya, *CbC Report* yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang merupakan Entitas Induk ke DJP akan dipertukarkan melalui pertukaran informasi secara otomatis (*Automatic Exchange of Information/Aeol*) dengan otoritas pajak negara / yuridiksi yang memiliki *Qualifying Competent Authority Agreement (QCAA)* dengan Indonesia. Melalui Aeol tersebut, secara

²⁷ <http://pajak.go.id/e-form>, diakses pada 06 Juli 2018.

²⁸ Ibid.

resiprokal Indonesia juga akan menerima pertukaran *CbC Report* terkait dengan Wajib Pajak Indonesia yang entitas induknya berdomisili di luar negeri dari negara / yuridiksi tempat Entitas Induk tersebut berdomisili²⁹

CbC Reporting ini memnuat informasi mengenai:

- a. Alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau yuridiksi dari seluruh anggota Grup Usaha baik dalam negeri maupun luar negeri
- b. Daftar anggota Grup Usaha dan kegiatan usaha utama per negara atau yuridiksi
- c. Penjelasan lain yang relevan dengan informasi sebagaimana pada poin a dan b.³⁰

Entitas yang Dilaporkan dalam *CbC Report* disebut sebagai Entitas Konstituen yang terdiri dari :

- a. Entitas Induk tertinggi (*Ultimate Parent Entity/UPE*)
- b. Setiap anggota Grup Usaha yang dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi Entitas Induk (baik UPE maupun non-UPE) untuk keperluan pelaporan keuangan
- c. Setiap anggota Grup Usaha yang tidak dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi Entitas Induk karena pertimbangan ukuran usaha atau materialitas, dan/atau
- d. Bntu Usaha Tetap (BUT).³¹

Dan yang wajib menyampaikan *CbC Report* adalah sebagai berikut :

²⁹ <http://www.pajak.go.id/cbcr>, diakses pada 06 Juli 2018

30 Ibid.

³¹ Ibid.

- a. Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan UPE dari suatu Grup Usaha dengan peredaran bruto konsolidasi lebih dari atau sama dengan Rp 11.000.000.000.000,- (sebelas triliun rupiah) wajib menyelenggarakan dengan menyampaikan *CbC Report* melalui mekanisme ini disebut sebagai *primary filing*. Kewajiban ini juga berlaku bagi UPE yang seluruh anggota grup usahanya merupakan Wajib Pajak dalam negeri.
- b. Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan anggota Grup Usaha yang UPE-nya merupakan subjek pajak luar negeri dengan peredaran bruto konsolidasi lebih dari atau sama dengan € 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta euro) wajib menyampaikan *CbC Report* ke DJP. Penyampaian *CbC Report* melalui mekanisme ini disebut sebagai *local filing*. Pada dasarnya mekanisme *local filing* diwajibkan hanya apabila Indonesia tidak mendapatkan *CbC Report* UPE di luar negeri melalui mekanisme Aeol. Oleh karena itu, mekanisme *local filing* hanya diwajibkan kepada anggota Grup Usaha di Indonesia apabila UPE-nya berdomisili di negara atau yuridiksi yang :
 - a. Tidak wajib menyampaikan *CbC Report*
 - b. Memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakan namun tidak memiliki QCCA, atau

- c. Memiliki QCCA namun terjadi *systematic failure* sehingga *CbC Report* tidak dapat diperoleh pemerintah Indonesia dari negara atau yuridiksi tersebut melalui AEOI.³²

4. *E-Filing*

E-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jendral Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider (ASP)*. Layanan e-filing melalui *website* Direktorat Jendral Pajak telah terintegrasi dalam layanan DJP Online.³³

Layanan *e-filing* ini adalah salah satu bentuk modernisasi perpajakan yang dilakukan untuk mereformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap 3 bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan. Modernisasi perpajakan di lingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *Good Governance*, merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan teknologi yang handal dan terkini.³⁴

Latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan adalah:

1. Citra DJP, yang harus diperbaiki dan ditingkatkan

³² Ibid.

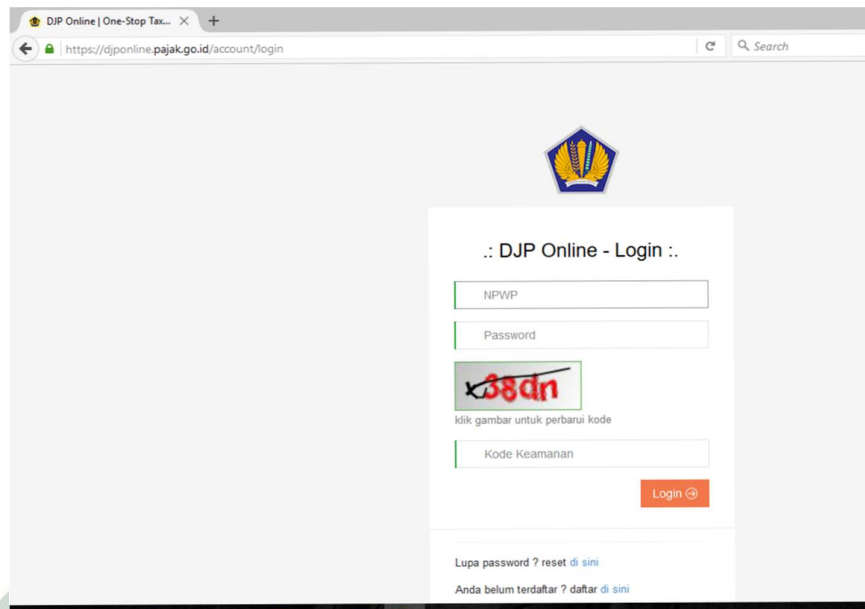
³³ <http://www.pajak.go.id/electronic-filing>, diakses pada 25 Juni 2018.

³⁴ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), 108

Dengan dilakukannya modernisasi perpajakan maka dibukalah beberapa layanan atau penerapan *e-system*, salah satunya adalah dibukanya layanan pelaporan SPT melalui *e-filing*. Penerapan sistem *e-filing* ini juga didukung dengan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Jendral Pajak agar penggunaannya bisa maksimal, seperti peraturan tentang Penyampaian SPT Elektronik berikut: “Wajib Pajak yang pernah

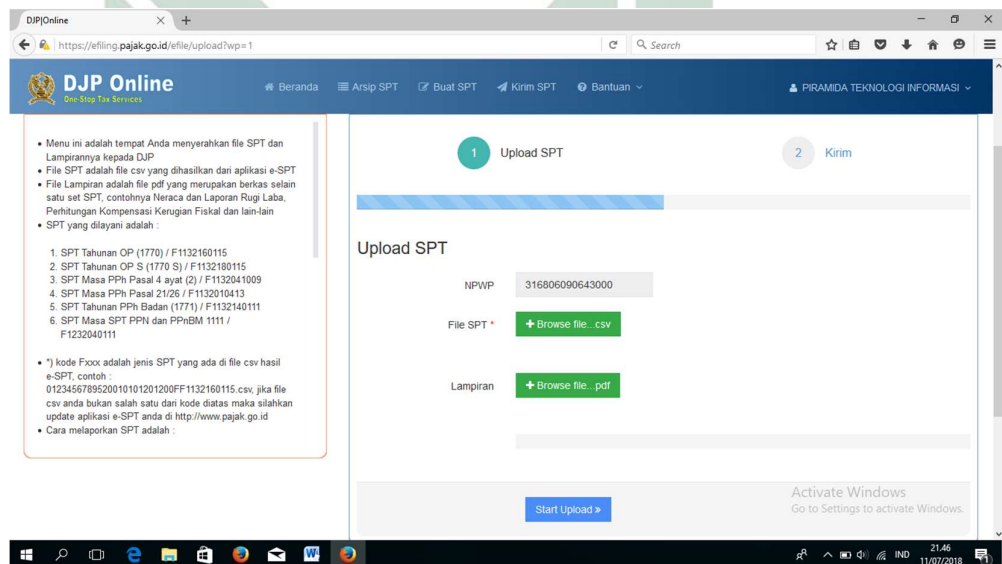
³⁶ Ibid., 112–113.

Gambar 2.2
Tampilan Awal masuk Akun E-Filing



Sumber : <https://djponline.pajak.go.id/account/login>

Gambar 2.3
Tampilan Sistem *E-Filing*



Sumber : <https://efiling.pajak.go.id/efile/upload?wp=1>

- Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

- Misalnya, batas penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak tanggal 30 April. Apabila Wajib Pajak Badan telah melaporkan sesuai batas tanggal ataupun sebelum batas tanggal Penyampain SPT Tahunan, Wajib Pajak Badan tersebut sudah memenuhi kepatuhan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar

⁴¹ Ibid.

Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.⁴²

Merujuk pada kriteria Wajib Pajak Patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah :

- Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
- Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
- Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%
- Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan

⁴² Ibid., 138-139

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.⁴⁴ Berikut adalah penjelasan tentang Wajib Pajak :

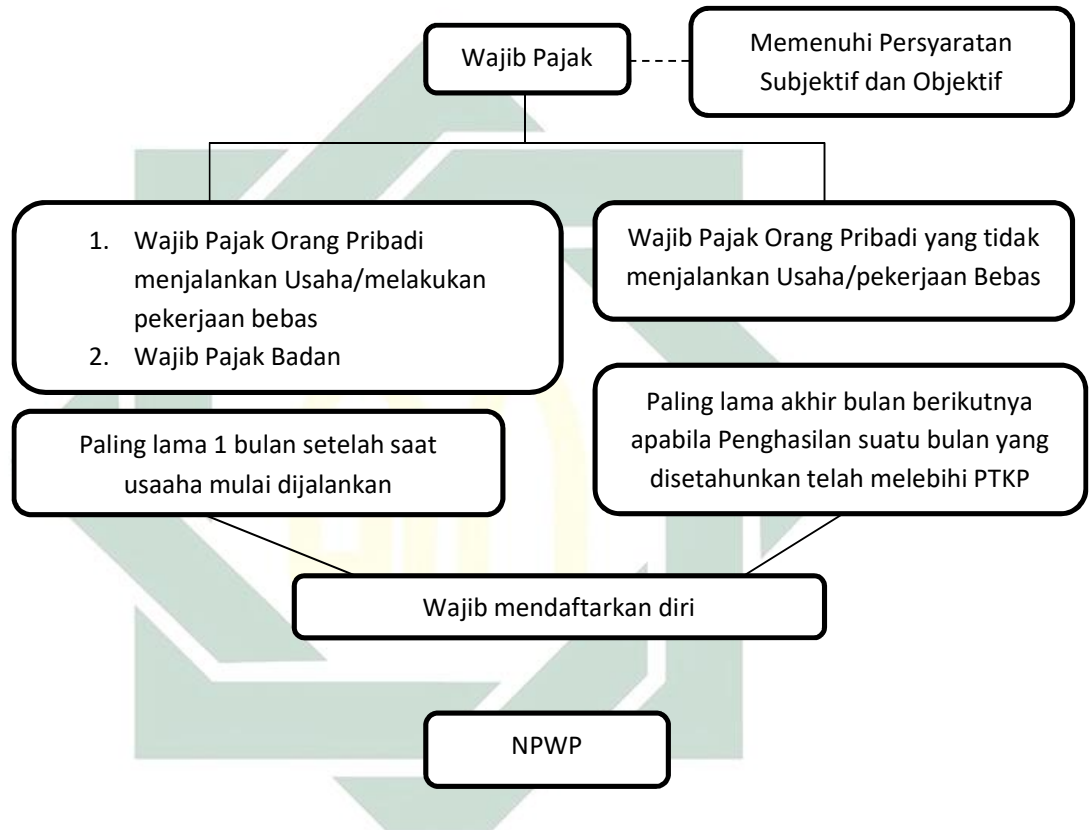
Orang Pribadi yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak adalah Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subyektif dan/atau objektif dalam bidang perpajakan diwajibkan untuk memperoleh NPWP.⁴⁵ Menurut Mardiasmo :

kewajiban mendaftarkan diri tersebut juga berlaku terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hukum atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian

[illegible]

pemisahan penghasilan dan harta.⁴⁷ Berikut adalah skema Wajib Pajak yang wajib mendaftarkan diri dan batas waktu mendaftarkan diri :⁴⁸

Gambar 2.4
Skema Kewajiban Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak



Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah :

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Herry Purwono, *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, (Jakarta : Erlangga, 2010), 25

- Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.⁵⁰

1. Pengertian

⁴⁹ Ibid, 31.

[illegible]

objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.⁵¹

2. Fungsi SPT

Menurut Mardiasmo, fungsi dari Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak,
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak
- c. Harta dan kewajiban dan/atau,
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.⁵²

3. Jenis SPT

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua jenis⁵³, yaitu :

- a. Surat Pemberitahuan Masa

Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa Pajak.

- b. Surat Pemberitahuan Tahunan

⁵¹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2009), 29

⁵² Ibid., 29-30.

⁵³ Ibid.

Surat Pemberitahuan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak itu sendiri meliputi:

1. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771 – Rupiah)
2. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diijinkan untuk menyelenggarakan pembukuan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang USD (1771 – USD)
3. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang melakukan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto, yang berasal dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenai PPh Final dan atau sifatnya final, dan berasal dari penghasilan lain (1770)
4. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, berasal dari dalam negeri lainnya, dan yang dikenai PPh Final dan atau sifatnya final (1770 S)
5. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak memiliki penghasilan lain selain bunga bank dan atau bunga deposito (1770 SS).⁵⁴

⁵⁴ Juli Ratnawati, *Dasar-Dasar Perpajakan*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2012), 25.

- Formulir kertas (hardcopy), atau
- E-SPT

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak
- b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak, atau
- c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.⁵⁶

Berikut adalah Tabel Batas Waktu Penyampain SPT⁵⁷ :

Tabel 2.1
Tabel Batas Waktu Penyampaian SPT Masa

⁵⁷ Juli Ratnawati, *Dasar-Dasar Perpajakan*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2012), 26.

No	Jenis SPT Masa	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
1	PPh Pasal 21/26	Tanggal 10 pada bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
2	PPh Pasal 23/26	Tanggal 10 pada bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
3	PPh Pasal 25	Tanggal 15 pada bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
4	PPh Pasal 22, PPN, dan PPnBM oleh bea cukai	1 hari setelah dipungut	7 hari setelah pembayaran
5	PPh Pasal 22 – Bendaharawan Pemerintah	Pada hari penyerahan barang	Tanggal 14 bulan berikutnya
6	PPh Pasal 22 - Pertamina	Sebelum pembayaran <i>Delivery Order</i>	Paling lambat tanggal 20 sebelum masa pajak berakhir
7	PPh Pasal 22 – Pemungutan Tertentu	Tanggal 10 pada bulan berikutnya	20 hari sejak akhir masa pajak
8	PPh Pasal 4 ayat 2	Tanggal 10 pada bulan berikutnya	20 hari sejak akhir masa pajak
9	PPN dan PPnBM - PKP	Akhir bulan berikutnya, sebelum penyampaian SPT	Akhir masa pajak berikutnya

Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT adalah 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan. Perpanjangan ini dapat

- Penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang
- Laporan Keuangan Sementara
- Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

Surat pemberitahuan tersebut ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak. Surat pemberitahuan ini dapat disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak secara :

- a. Langsung
- b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat
- c. Dengan cara lain, yang meliputi :
 1. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat
 2. E-filing melalui ASP.⁵⁸

6. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

Sanksi untuk keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau tidak sesuai dengan batas waktu perpanjangan maka dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda :

⁵⁸ Juli Ratnawati, *Dasar-Dasar Perpajakan*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2012), 26 – 27.

- d. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
Pribadi sebesar Rp 100.000,-⁵⁹

d. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
Pribadi sebesar Rp 100.000,-⁵⁹

A. Profil Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sidoarjo Utara

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara mulai beroperasi pada tanggal 27 November 2007 berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-158/PJ/2007 tanggal 5 November tentang Penerapan Organisasi. Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Kantor Wilayah DJP Jawa timur III dan Kantor Wilayah DJP Bali. Sebelumnya Kantor ini bernama Kantor Pelayan Pajak Sidoarjo Timur. Gedung Kantor KPP Pratama Sidoarjo Utara diresmikan oleh Menteri Keuangan saat itu Ibu Sri Mulyani pada tanggal 4 Desember 2007.

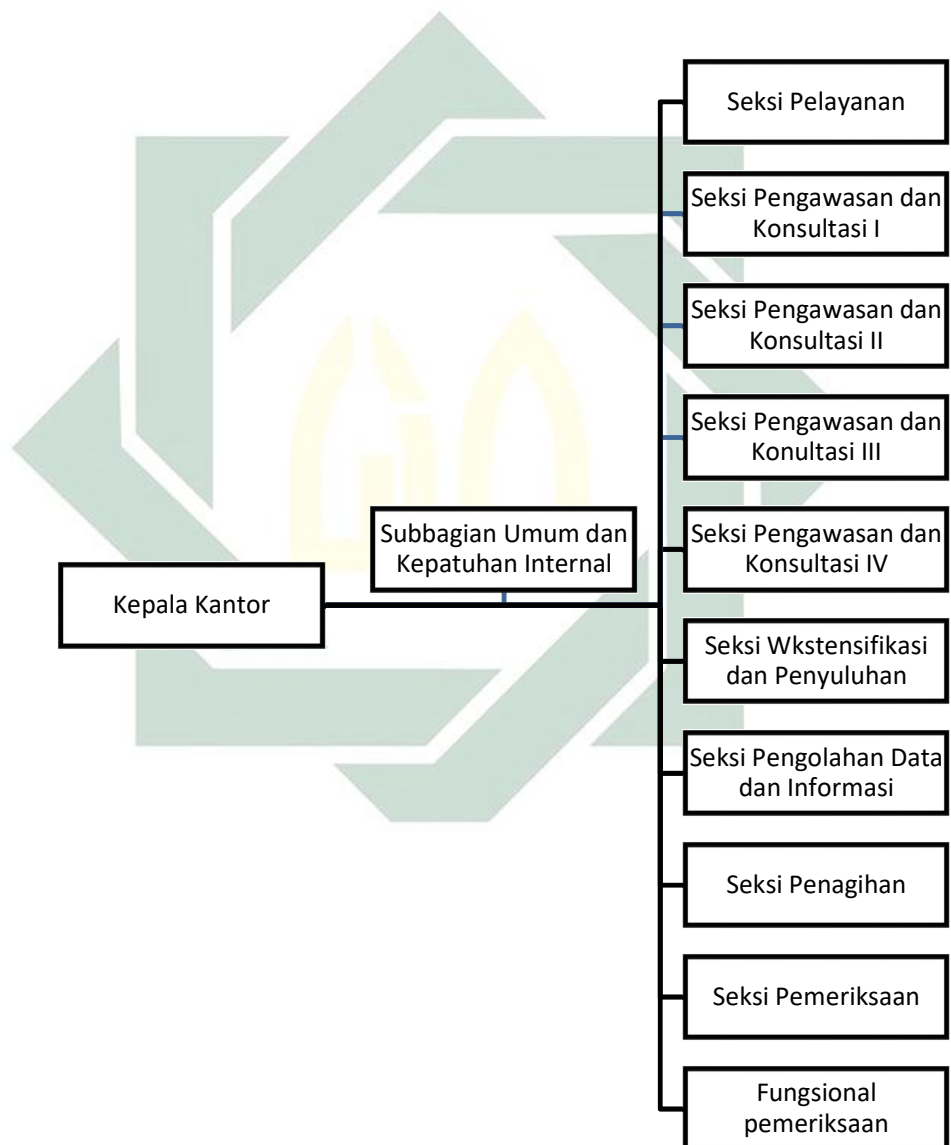
[illegible]

- a. Menerapkan manajemen kasus dan sistem alur kerja sebagai sistem pengawasan melekat atas tugas-tugas pelayanan dan pengawasan
- b. Menerapkan kode etik pegawai DJP yang menjadi standard perilaku pegawai yang secara jelas mengatur kewajiban dan larangan bagi para pegawai
- c. Melakukan konsolidasi berupa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pembinaan sikap mental dan perilaku secara berkesinambungan, pemberian reward dan punishment kepada para pegawai
- d. Menerapkan dan mengembangkan budaya “zero telorance of corruption”

- a. Menerapkan manajemen kasus dan sistem alur kerja sebagai sistem pengawasan melekat atas tugas-tugas pelayanan dan pengawasan
- b. Menerapkan kode etik pegawai DJP yang menjadi standard perilaku pegawai yang secara jelas mengatur kewajiban dan larangan bagi para pegawai
- c. Melakukan konsolidasi berupa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pembinaan sikap mental dan perilaku secara berkesinambungan, pemberian reward dan punishment kepada para pegawai
- d. Menerapkan dan mengembangkan budaya “zero telorance of corruption”

3. Struktur Organisasi

Gambar 3.1
Struktur Organisasi



a. Kepala Kantor	1 Orang
b. Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian	10 Orang
c. Account Representative	30 Orang
d. Pelaksana (termasuk juru Sita, OC dan Bendaharawan)	41 Orang
e. Fungsional Pemeriksa Pajak	12 Orang

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara melayani wilayah Sidoarjo Utara, yaiitu terdiri dari 4 kecamatan :

- Kecamatan Waru
- Kecamatan Sedati
- Kecamatan Gedangan
- Kecamatan Buduran

a. Visi

Visi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara adalah menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang Excelent dalam Kinerja Penerimaan dan Pelayanan.

- a. Permohonan *EFIN* dilakukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, tidak boleh diwakilkan atau dikuasakan oleh orang lain
- b. Wajib Pajak mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi *EFIN* dengan cara mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, atau tempat lain yang sudah ditentukan
- c. Wajib Pajak menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan salinan berupa :
 1. KTP atau Paspor
 2. Kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
- d. Wajib Pajak memberikan alamat email aktif yang nantinya digunakan sebagai sarana pemenuhan atas hak dan kewajiban perpajakan.

[illegible]

ini merupakan akun untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (hal-hal lain yang mengenai perpajakan dan bersifat sangat rahasia) oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab di suatu perusahaan. Untuk mengetahui dan dapat mengawasi penggunaannya. Selain itu, perusahaan mendaftarkan *e-filing* direktur suatu perusahaan juga terlebih dahulu harus sudah mendaftar *e-filing*.

Sama halnya dengan Wajib Pajak Orang Pribadi, saat mendaftarkan *EFIN* juga membawa serta dokumen-dokumen berikut:

- Menyerahkan Formulir yang telah diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak
- Menunjukkan dan menyerahkan salinan Kartu NPWP atau KTP dan nama pengurus yang bersangkutan
- Menunjukkan dan menyerahkan salinan NPWP atau SKT badan
- Kartu Identitas diri Pengurus (KTP atau Paspor)

ini merupakan akun untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (hal-hal lain yang mengenai perpajakan dan bersifat sangat rahasia) oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab di suatu perusahaan. Untuk mengetahui dan dapat mengawasi penggunaannya. Selain itu, perusahaan mendaftarkan *e-filing* direktur suatu perusahaan juga terlebih dahulu harus sudah mendaftar *e-filing*.

Sama halnya dengan Wajib Pajak Orang Pribadi, saat mendaftarkan *EFIN* juga membawa serta dokumen-dokumen berikut:

- Menyerahkan Formulir yang telah diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak
- Menunjukkan dan menyerahkan salinan Kartu NPWP atau KTP dan nama pengurus yang bersangkutan
- Menunjukkan dan menyerahkan salinan NPWP atau SKT badan
- Kartu Identitas diri Pengurus (KTP atau Paspor)

- ini merupakan akun untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (hal-hal lain yang mengenai perpajakan dan bersifat sangat rahasia) oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab di suatu perusahaan. Untuk mengetahui dan dapat mengawasi penggunaannya. Selain itu, perusahaan mendaftarkan *e-filing* direktur suatu perusahaan juga terlebih dahulu harus sudah mendaftar *e-filing*.
- Sama halnya dengan Wajib Pajak Orang Pribadi, saat mendaftarkan *EFIN* juga membawa serta dokumen-dokumen berikut:
- Menyerahkan Formulir yang telah diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak
 - Menunjukkan dan menyerahkan salinan Kartu NPWP atau KTP dan nama pengurus yang bersangkutan
 - Menunjukkan dan menyerahkan salinan NPWP atau SKT badan
 - Kartu Identitas diri Pengurus (KTP atau Paspor)

lengkapi dengan stempel perusahaan

Pajak yang sudah mendapatkan nomor *EFIN* dapat membuat akun yang nantinya digunakan sebagai sarana penyampaian SPT secara elektronik. Setelah Wajib Pajak sudah membuat akunnya maka Wajib Pajak sudah dapat menyampaikan SPT elektronik melalui *e-filing*. SPT elektronik ini dapat diisi dengan mengisi melalui aplikasi atau langsung dari form yang terdapat pada aplikasi *e-filing*. Kemudian Wajib Pajak bisa mengirimkan SPT dengan menggunakan aplikasi tersebut. Setelah di *upload* maka Wajib Pajak memperoleh notifikasi yang dikirimkan ke email yang telah didaftarkan sebelumnya, dan kode tersebut dimasukkan ke kolom pada sistem *e-filing*, barulah Wajib Pajak dapat memberitahukan Wajib Pajak terkirim dan Wajib Pajak menerima Bukti Pengiriman Elektronik yang dikirimkan ke email yang telah didaftarkan.

doarjo Utara terus mendorong Wajib Pajak untuk melaporkan SPT
pun Tahunannnya secara *online* dengan menggunakan *e-filing*. Dan
kukan upaya-upaya seperti diadakan asistensi, yaitu pendampingan
ian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan sistem *e-*
da Wajib Pajak yang baru atau yang pertama kali mengenal sistem

n Wajib Pajak Badan dalam Penyampaian Surat
shuan

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (Moh. Zain:2004) sebagai :

“Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :

- Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
- Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas,
- Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar,
- Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”⁶¹

Menurut Siti Kurnia Rahayu Kepatuhan dibedakan menjadi 2 jenis yaitu kepatuhan secara Formil dan Kepatuhan secara Material. Kepatuhan secara formil yaitu kepatuhan Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT secara tepat sebelum atau saat batas waktu yang telah ditentukan, penelitian ini berfokus pada kepatuhan secara formil. Dimana Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT secara tepat adalah termasuk kepatuhan formil.

Wajib pajak badan untuk tahun 2017 di wilayah Sidoarjo Utara berjumlah 12.969 yang meliputi berbagai bidang usaha dari usaha kecil, menengah sampai ke atas, jenis usaha Wajib Pajak Badan di KPP Sidoarjo Utara berbagai macam jenis usaha, seperti *Manufacturing* atau Produksi, Perdagangan, Jasa Keuangan, Jasa Wisata, Jasa Perorangan dan Jasa-jasa Umum. Wilayah Sidoarjo Utara ini sudah termasuk wilayah yang modern dikarenakan letak wilayahnya yang berdekatan dengan ibu kota Jawa Timur

⁶¹ Ibid., 138.

Dari data penelitian jumlah Wajib Pajak Badan yang aktif melaporkan surat pemberitahuannya (SPT) masa maupun Tahunannya di KPP Sidoarjo Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Sumber : Data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sidoarjo Utara, diolah kembali

Dan jumlah wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT Masa maupun Tahunan secara *online* menggunakan *e-filing* sebanyak :

Tabel 3.2

Sumber : Data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara

Wajib Pajak Badan dalam menggunakan Sistem *e-filing* dalam pelaporannya mengungkapkan bahwa penggunaan *e-filing* dalam menyampaikan SPT sangatlah membantu sekali dikarenakan cara yang efektif, efisien, hemat, *paperless*, dan *realtime*. Wajib Pajak Badan yang telah menggunakan sistem informasi dalam pengoperasian perusahaan akan mudah beradaptasi dan dapat menggunakan sistem *e-filing* ini dengan mudah, sehingga Wajib Pajak merasa dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya khususnya secara formil. Akan tetapi Wajib Pajak Badan yang kurang menyentuh dunia modernisasi dan sistem informasi merasa kesulitan akan penyampaian SPT dengan sistem *e-filing* ini, dikarenakan sistem dalam penyampaian SPT dengan *e-filing* ini membutuhkan proses yang panjang,

Setelah melaporkan SPT secara *online* dengan menggunakan sistem *e-filing*, wajib pajak telah memenuhi kepatuhan secara formal, dengan perubahan cara penyampaian SPT yang terjadi maka dapat menimbulkan dampak-dampak yang terjadi karena penerapan sistem yang berbeda dengan pelaporan secara manual. Dampak yang terjadi setelah penerapan peraturan undang-undang pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak yang masih merasa kesulitan dan kebingungan menggunakan sistem ini untuk melaporkan SPT nya, sehingga banyak Wajib Pajak yang ingin berkonsultasi mengatasi masalahnya dengan datang dan mengantre ke *help desk* untuk menyelesaikan masalah atau kendala yang mereka alami. Akan tetapi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara telah melakukan pengantisipasi dan edukasi terhadap Wajib Pajak yang baru mengenal sistem *e-filing* dengan diadakannya *asistensi*, yaitu pendampingan penggunaan atau tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan sistem *e-filing*, asistensi ini dilakukan oleh *Account Representative* Wajib Pajak yang bersangkutan.

D. Implikasi Penerapan Sistem *E-filing*

Setelah melaporkan SPT secara *online* dengan menggunakan sistem *e-filing*, wajib pajak telah memenuhi kepatuhan secara formal, dengan perubahan cara penyampaian SPT yang terjadi maka dapat menimbulkan dampak-dampak yang terjadi karena penerapan sistem yang berbeda dengan pelaporan secara manual. Dampak yang terjadi setelah penerapan peraturan undang-undang pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak yang masih merasa kesulitan dan kebingungan menggunakan sistem ini untuk melaporkan SPT nya, sehingga banyak Wajib Pajak yang ingin berkonsultasi mengatasi masalahnya dengan datang dan mengantre ke *help desk* untuk menyelesaikan masalah atau kendala yang mereka alami. Akan tetapi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara telah melakukan pengantisipasi dan edukasi terhadap Wajib Pajak yang baru mengenal sistem *e-filing* dengan diadakannya *asistensi*, yaitu pendampingan penggunaan atau tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan sistem *e-filing*, asistensi ini dilakukan oleh *Account Representative* Wajib Pajak yang bersangkutan.

Selain itu dampak yang terjadi kepada KPP adalah semakin menurunnya antrean untuk pelaporan dikarenakan pengalihan pelaporan dari manual ke sistem *e-filing*, akan tetapi untuk pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2017 masih banyak wajib pajak yang melaporkan SPT nya secara manual di batas akhir penyampaian SPT, jadi masih terlihat antrean wajib pajak pada akhir masa pelaporan SPT Tahunan yang belum menggunakan sistem *e-filing*.

Dampak dari akibat penggunaan *e-filing* adalah meningkatnya Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan baik Masa maupun Tahunannya. Dilihat dari data Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan terus meningkat jumlahnya tiap tahun.

Selain dampak di atas sistem *e-filing* ini juga memiliki dampak yang bersifat membantu dan memudahkan Wajib Pajak yang ingin menyampaikan Surat Pemberituannya (SPT), dengan menyampaikan secara *online* Wajib Pajak tetap duduk di depan komputer, laptop maupun *gadget* yang telah terkoneksi dengan internet, Wajib Pajak dapat melaporkan Surat Pemberituannya secara mudah, aman, gratis dan *realtime*.

Perubahan cara penyampaian Surat Pemberitahuan ini dapat berakibat juga pada sistem pengarsipan dokumen, Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberituannya secara manual tidak menggunakan Surat Pemberitahuan secara elektronik maka Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak harus di input lagi ke dalam sistem data. Sedangkan Wajib Pajak yang sudah melaporkan Surat Pemberituannya (SPT) secara elektronik otomatis data yang telah disampaikan tersimpan kedalam server. Keamanan

Bila sudah melaporkan Surat Pemberitahuan secara elektronik dengan cara *online* melalui sistem *e-filing* dan ternyata ada terjadi kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan maka bisa dilakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pembetulan melalui sistem *e-filing* juga. Jika waktu awal penggunaan sistem *e-filing* ini tidak bisa untuk melaporkan SPT Pembetulan, akan tetapi sistemnya saat ini terus diperbaiki dan sekarang sudah bisa melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pembetulan secara *online* melalui sistem *e-filing*.

A. Analisis Implementasi Sistem *E-filing* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara

Penerapan sistem *e-filing* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sidoarjo Utara sudah diterapkan mulai tahun 2014, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang penyampaian Surat Pemberitahuan dengan menggunakan saluran tertentu yang Ditetapkan oleh Jendral Pajak yaitu dengan melalui sistem *e-filing* ini. Saat tahun 2014 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masih bersedia menerima pelaporan secara manual meskipun penyampaian secara *e-filing* sudah di terapkan, namun pada saat itu belum ada peraturan dari Menteri Keuangan yang mengharuskan Wajib Pajak melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online* atau *e-filing*.

[illegible]

Penerapan sistem *e-filing* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara sudah sangat baik, peneliti sudah melakukan penelitian yang membuktikan bahwa penerapan *e-filing* ini sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan prosedur. Sebagaimana penerapan awal mulai dari Wajib Pajak Badan yang ingin menggunakan sistem *e-filing* ini harus mencetak nomor *EFIN* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah ditentukan. Alur permohonan percetakan *EFIN* harus dilakukan oleh Wajib Pajak itu sendiri atau yang telah diberi kuasa, tidak hanya itu proses permohonan percetakan ini juga mengharuskan Wajib Pajak Badan yang bersangkutan untuk membawa cap atau stempel perusahaan yang digunakan saat proses percetakan *EFIN*, jadi keamanan data Wajib Pajak Badan bisa terjamin karena alur administrasi yang sangat ketat.

Sejak tahun 2014 saat diberlakukannya penyampaian Surat pemberitahuan (SPT) secara elektronik ini masih belum maksimal, dikarenakan juga belum adanya peraturan yang harus menetapkan keharusan bagi Wajib Pajak Badan yang ingin melakukan pelaporan harus menggunakan sistem *e-filing*. Menurut data yang telah didapat dari penelitian, sampai tahun 2017 Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sidoarjo Utara berjumlah 12.969 akan tetapi Wajib Pajak Badan yang memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa hanya berjumlah 4.898 dan untuk penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebanyak 3.729, dari data tersebut diketahui bahwa tidak sampai setengah jumlah Wajib Pajak Badan yang ada di KPP Sidoarjo Utara yang memenuhi kewajibannya sebagai Wajib

beritahuannya, hanya dengan duduk di depan komputer dan dengan menggunakan *laptop* serta adanya jaringan koneksi internet maka Surat Pemberitahuannya secara *online* melalui sistem *e-filing* ini sangat menguntungkan terutama Wajib Pajak Badan yang harus mendaftarkan Surat Pemberitahuan Masa tiap bulannya. Tidak perlu datang dan mengantre di Kantor Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuannya. Untuk tahun 2017, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama melaporkan Surat Pemberitahuan secara *online* sebanyak 258 Wajib Pajak Badan. Angka

Pemberitahuannya, hanya dengan duduk di depan komputer dan sistem akan mengirimkan Wajib Pajak ke alamat e-mail yang terdaftar pada *adger* serta adanya jaringan koneksi internet.

Adapun Surat Pemberitahuannya secara online dapat diakses melalui aplikasi atau sistem *e-filing* ini sangat menguntungkan bagi Wajib Pajak Badan terutama Wajib Pajak Badan yang harus melaporkan Surat Pemberitahuan Masa tiap bulannya. Hal ini berarti Wajib Pajak tidak perlu datang dan mengantre di Kantor Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuannya.

Sedangkan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Prinsipal dapat melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan secara online.

Dari hasil penelitian terdapat sebanyak 258 Wajib Pajak Badan. Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak Badan yang menggunakan layanan online masih sedikit.

beritahuannya, hanya dengan duduk di depan komputer dan dengan menggunakan *laptop* serta adanya jaringan koneksi internet maka Surat Pemberitahuannya secara *online* melalui sistem *e-filing* ini sangat menguntungkan terutama Wajib Pajak Badan yang harus mendaftarkan Surat Pemberitahuan Masa tiap bulannya. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan karena Wajib Pajak perlu datang dan mengantre di Kantor Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuannya. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan terutama Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara *online* melalui sistem *e-filing* ini. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan terutama Wajib Pajak Badan. Angka ini menunjukkan bahwa sebanyak 258 Wajib Pajak Badan. Angka ini menunjukkan bahwa sebanyak 258 Wajib Pajak Badan.

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.⁶³

[illegible]

Penerapan sistem *e-filing* juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak khususnya peraturan secara formal, pembatasan tanggal penyampaian SPT Wajib Pajak Badan telah ditetapkan dalam Undang-Undang, maka dapat kita lihat pada tahun 2015 Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT masa sebanyak 4.188 dan SPT Tahunan sebanyak 3.009 Wajib Pajak Badan dengan jumlah 253 Wajib Pajak Badan yang menyampaikan secara *online* dengan menggunakan *e-filing*. Penyampaian SPT ini meningkat pada Tahun 2016 yang berjumlah 4.594 Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Masa dan sebanyak 3.318 Wajib Pajak Badan menyampaikan SPT Tahunan. Selain itu penyampaian SPT secara *online* juga meningkat menjadi 294 Wajib Pajak Badan. Penyampaian SPT untuk tahun 2017 terus meningkat berjumlah 4.898 Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Masa dan 3.729 Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan, akan tetapi untuk penyampaian SPT secara *online* dengan menggunakan sistem *e-filing* ini mengalami penurunan yaitu hanya 258 Wajib Pajak Badan.

[illegible]

Peningkatan kepatuhan secara formil, yaitu penyamaan SPT sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan terus meningkat dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2015 kepatuhan Wajib Pajak Badan sebanyak 32.29% dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 35,42%, dan pada tahun 2017 menjadi 37,77%, penggunaan *e-filing* ini juga mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke 2016 yaitu dari 253 menjadi 294 Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT dengan menggunakan sistem *e-filing*. Pada tahun 2017 penyampaian SPT Wajib Pajak Badan juga meningkat akan tetapi peningkatan ini tidak dibarengi dengan meningkatnya pelaporan SPT secara *online* dengan menggunakan *e-filing* yaitu menurun menjadi 258 Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT secara *online* menggunakan sistem *e-filing*. Dari data yang didapatkan penyebab penurunan ini dikarenakan Wajib Pajak masih bisa menyampaikan SPT-nya secara manual dengan datang langsung ke KPP Pratama Sidorajo Utara akan tetapi saat ini Wajib Pajak Bada sudah tidak dapat lagi menyampaikan SPT secara manual dikarenakan sudah diterapkan PMK No.9/PMK.03/2018 tentang pemberlakuan Penyampaian secara *online*. Selain itu Wajib Pajak Badan yang kurang mengenal modernisasi dalam sistem informasi masih merasa kesulitan untuk menggunakan sistem *e-filing* ini, Wajib Pajak Badan yang sudah memiliki EFIN yaitu untuk mengakses *e-filing* ini masih belum bisa mengaktifkannya dikarenakan pengoperasian yang panjang, seperti penyampaian SPT secara *e-filing* yaitu dimulai dari pengisian SPT secara elektronik kemudian login ke akun *e-filing* kita dan kemudian mengupload

SPT dalam bentuk elektronik setelah itu sistem akan mengkonfirmasi Jenis SPT yang akan disampaikan, dan mengirim kode verifikasi ke email yang telah didaftarkan kemudian kode tersebut *dicopy* ke dalam *e-filing*, kemudian *e-filing* bisa segera dikirimkan dan Wajib Pajak Badan mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik yang dikirimkan ke emailnya. Rangkaian proses yang panjang membuat Wajib Pajak Badan yang belum mengenal dan terbiasa menggunakan sistem yang modern akan merasa kesulitan, sehingga Wajib Pajak Badan lebih memilih untuk menyampaikan SPTnya secara manual.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara telah menerapkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan bahwa Wajib Pajak Badan harus menyamakan SPT secara *online*. Maka dari itu KPP Sidoarjo Utara mengadakan asistensi, dimana pendampingan Wajib Pajak dengan *Account Representative* untuk menyampaikan SPT secara *online* dengan sistem *e-filing*. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Badan untuk penyampaian SPT secara masa maupun tahunan masih jauh dari jumlah keseluruhan Wajib Pajak Badan yang telah terdaftar di KPP Sidoarjo Utara, yakni sebanyak 12.969 Wajib Pajak Badan yang terdaftar. Pada tahun 2017 tercatat masih 4.898 Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT masa dan sebanyak 3.729 Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT tahunan. Dengan penerapan *e-filing* ini ditujukan kepada Wajib Pajak untuk mempermudah cara penyampaian SPT sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan.

C. Analisis Implikasi Sistem *E-filing* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Sidoarjo Utara

Perubahan sesuatu pasti menimbulkan sesuatu yang berbeda juga, sama halnya dengan perubahan cara penyampaian pelaporan Surat Pemberitahuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara, yang dulunya Wajib Pajak yang melakukan pelaporan dengan menggunakan cara manual (dengan menggunakan *hardcopy* dan belum menggunakan sistem) berganti menggunakan cara komputerisasi atau menggunakan sistem, dimana Wajib Pajak Badan mengisi Surat Pemberituannya tidak secara manual melalui tulisan ataupun excel tetapi Wajib Pajak mengisi Surat Pemberituannya dengan menggunakan sistem yang bersifat komputerisasi dan dapat menghasilkan Surat Pemberitahuan Elektronik. Surat Pemberitahuan Elektronik ini yang nantinya digunakan sebagai pengganti Surat Pemberitahuan manual agar dapat diinput untuk pelaporan secara *online* dengan menggunakan sistem *e-filing*.

Pengimplementasian *e-filing* juga berdampak pada perubahan yang terjadi dengan adanya penerapan penyampaian pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan cara *online* menggunakan sistem *e-filing* ini, implikasi yang paling penting adalah terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan Surat Pemberituannya, dampak ini merupakan tujuan dari Direktorat Jendral Pajak yang menerapkan pelaporan secara *online* dengan menggunakan sistem *e-filing*, dengan menggunakan sistem ini

[illegible]

sangat luar biasa terjadi pada saat batas akhir waktu penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan, banyak Wajib Pajak Badan yang tidak ingin terkena denda yang dikarenakan telat menyampaikan atau tidak menyampaikan SPT Tahunannya, maka dari itu mereka melaporkan SPT Tahunannya pada saat batas waktu penyampaian. Jika seluruh Wajib Pajak menyampaikan SPT secara *online* maka antrean yang biasa terjadi di KPP akan mengalami penurunan dan Wajib Pajak Badan juga dapat menyampaikan SPT secara nyaman, aman, hemat, *realtime* dan *paperless*.

Penerapan sistem *e-filing* menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 yang mewajibkan Wajib Pajak Badan menyampaikan Surat Pemberitahuan secara *online* dengan menggunakan sistem *e-filing* ini juga berdampak pada antrean Wajib Pajak yang ingin berkonsultasi tentang tata cara penggunaan sistem *e-filing* ini, dikarenakan Wajib Pajak yang belum tahu atau baru mengenal sistem ini. Akan tetapi untuk mengantisipasi hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sidoarjo Utara telah mengadakan program bimbingan kepada Wajib Pajak yang dinamakan *asistensi*, yaitu pendampingan penggunaan dan tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan sistem *e-filing* yang dilakukan oleh *Account Representative* Wajib Pajak yang bersangkutan.

Selain itu penerapan sistem *e-filing* ini juga berdampak pada sistem pengarsipan dokumen SPT Wajib Pajak Badan, dimana jika penyampaian SPT dilakukan secara manual Wajib Pajak Badan harus menyampaikan SPT secara *hardcopy* yang nantinya akan diinput ke dalam komputer oleh petugas

Bila terjadi dalam pengisian SPT yang telah disampaikan, baik secara *online* ataupun manual Wajib Pajak Badan juga dapat melakukan pembetulan dan menyampaikan SPT Pembetulan secara *online* melalui sistem *e-filing*. Wajib Pajak Badan merasa puas dengan pelayanan penyampaian SPT secara *online* dengan menggunakan sistem *e-filing*, dimana Wajib Pajak Badan merasa termudahkan urusannya khususnya di bidang perpajakan yang menjadi kewajiban mereka untuk menyampaikan SPT tiap bulannya, dengan adanya sistem ini Wajib Pajak Badan merasa diuntungkan karena selain menghemat biaya dan waktu Wajib Pajak Badan juga dapat melaksanakan sistem administratif yang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi *e-filing* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara sudah diterapkan dengan sangat baik, terbukti dengan Wajib Pajak Badan yang ingin mendaftarkan *EFIN*nya harus melengkapi dokumen yang telah ditetapkan. Penerapan sistem *e-filing* ini dimulai sejak tahun 2014, penggunaan *e-filing* ini terus meningkat dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2015 sebanyak 253 Wajib Pajak Badan dan pada tahun 2016 sebanyak 294 Wajib Pajak Badan akan tetapi pada tahun 2017 menurun menjadi 258 Wajib Pajak Badan.
2. Kepatuhan Wajib Pajak Badan dapat dilihat dengan penyampaian SPT secara Formil. Dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak Badan dari tahun 2015–2017 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT Masa maupun Tahunan meningkat, meskipun masih jauh dari data Wajib Pajak Badan yang terdaftar. Akan tetapi penggunaan *e-filing* hanya meningkat dari tahun 2015 ke 2016 dan menurun pada tahun 2017, penurunan ini dikarenakan Wajib Pajak Badan yang belum terbiasa atau baru menggunakan sistem *e-filing*. Implikasi dari penerapan sistem *e-filing* ini dapat dilihat dari meningkatnya penyampaian SPT oleh wajib pajak badan. Wajib Pajak Badan dapat menikmati pelayanan penyampaian secara *online* dan dapat meningkatkan

2. Kepatuhan Wajib Pajak Badan dapat dilihat dengan penyampaian SPT secara Formil. Dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak Badan dari tahun 2015–2017 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT Masa maupun Tahunan meningkat, meskipun masih jauh dari data Wajib Pajak Badan yang terdaftar. Akan tetapi penggunaan *e-filing* hanya meningkat dari tahun 2015 ke 2016 dan menurun pada tahun 2017, penurunan ini dikarenakan Wajib Pajak Badan yang belum terbiasa atau baru menggunakan sistem *e-filing*. Implikasi dari penerapan sistem *e-filing* ini dapat dilihat dari meningkatnya penyampaian SPT oleh wajib pajak badan. Wajib Pajak Badan dapat menikmati pelayanan penyampaian secara *online* dan dapat meningkatkan

Setelah penjabaran di atas penerapan sistem *e-filing* masih belum maksimal, dilihat dari menurunnya penyampaian SPT oleh Wajib Pajak yang menggunakan *e-filing*, maka dari itu saran yang diberikan adalah untuk ditingkatkan lagi pemahaman Wajib Pajak Badan dalam penyampaian SPT secara *online* dengan sistem *e-filing* melalui sosialisasi dan asistensi yang dilakukan oleh KPP, dikarenakan sudah berlakunya PMK 03/PMK.03/2018 yang telah mewajibkan seluruh penyampaian SPT Wajib Pajak Badan melalui sistem *e-filing*. Sehingga Wajib Pajak Badan mengerti tentang keuntungan dan kemudahan menggunakan sistem *e-filing* dalam penyampaian SPT.

Set

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, dkk. *Implementasi Program E-Filing Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro*. 2015
- Amrul dan Rusli. *Analisis Penerapan Efiling Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Timur*. 2016
- Astuti, Inne Nidya. *Analisis Penerapan Efiling Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara*. Surabaya : Universitas Negeri Surabaya. 2015
- Avianto, Gusma Dwi, dkk. *Analisis Peran Efiling Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)*. 2016
- Direktorat Jendral Pajak. PER-01/PJ/2017.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi: Edisi Revisi*. Surabaya, Cet XII. 2017
- Handayani, Kartika Ratna dan Sihar Tambun. *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating (Survei Pada Perkantoran Sunrise Garden Di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat*. 2016
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Empat, 2010
- <http://pajak.go.id/>
- <https://djponline.pajak.go.id/account/login>.
- <https://kbbi.web.id/patuh>.
- <https://www.google.com/search?q=e+billing&source>.

www.pajak.go.id/content/penyampaina-surat-pemberitahuan-online-efiling.